

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Politik luar negeri Republik Indonesia yang merupakan negara berkembang, baik sebagai *policies* maupun *action* senantiasa mengandung unsur kesinambungan dan perubahan yang saling berinteraksi. Hal ini meliputi nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat serta prinsip-prinsip yang disepakati, sementara perubahan menyangkut strategi, prioritas dan cara-cara bagaimana memperjuangkan kepentingan nasional. Proses transformasi yang terjadi dari input menjadi output sekaligus merupakan cerminan bagaimana sebuah negara mengelola politik luar negeri yang dipengaruhi oleh tiga faktor; lingkungan internal/eksternal, struktur dan perilaku sosial. Nilai-nilai dan prinsip politik luar negeri dapat digolongkan ke dalam tataran ideal. Meskipun terkadang terdapat kesenjangan, inkonsistensi atau bahkan kontradiksi dalam mentransformasikan tataran ideal ke dalam tataran operasional pasti selalu bermuara pada satu tujuan mewujudkan kepentingan nasional.

Menurut Paul Seabury, istilah kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita suatu bangsa berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain, dengan kata lain gejala tersebut merupakan suatu normatif atau konsep umum kepentingan nasional. Dalam pengertian kepentingan nasional hanya dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai negara secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Kepentingan nasional dalam pengertian deskriptif berarti memindahkan metafisika ke dalam fakta (kenyataannya). Dengan kata lain kepentingan nasional serupa dengan para perumus politik luar negeri. (Seabury, 1964:2)

Kepentingan nasional sebelum mencapai level pengaplikasian harus melalui segenap tahapan dimulai dari awal perumusan, proses persiapan, pelibatan setiap elemen pemerintah, pemanfaatan instrumen yang dimiliki negara hingga faktor pendukung lainnya hingga mencapai tatanan ideal dari kepentingan nasional sebagai salah satu tujuan negara. Inilah yang menggambarkan

penempatan kepentingan nasional khususnya di Indonesia tidak semudah yang diperkirakan, selain kepentingan nasional yang tentunya mencakup beragam aspek kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pasca Orde Baru, kepentingan nasional Indonesia lebih merujuk pada aspek ekonomi dan politik. Di era pemerintahan Habibie (1998-1999), misalnya kepentingan nasional dalam dunia diplomasi mengacu ke upaya pemulihan ekonomi setelah krisis 1997. Sementara diplomasi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) dalam konteks kepentingan nasional, selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan diarahkan pula pada upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik dan mempertahankan integritas teritorial Indonesia. Hal lain yang tidak kalah penting adalah demokratisasi melalui reposisi peran militer agar kembali ke peran profesional. Ancaman terhadap integrasi nasional di era Abdurrahman Wahid, menjadi kepentingan nasional yang sangat mendesak dan diprioritaskan pada kala itu. Dilanjutkan oleh pemerintahan Megawati (2001-2004), ditambah kepentingan pokok lain terkait dengan upaya mengatasi terorisme. Kepentingan nasional era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) pun sebenarnya sebagai kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, selain keinginan untuk menempatkan Indonesia dalam posisi yang kembali aktif dalam pencaturan politik global.

Kerjasama Selatan-Selatan adalah kerangka kerja yang luas untuk kolaborasi di antara negara-negara Selatan dalam domain politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan teknis. Melibatkan dua atau lebih negara-negara berkembang, hal itu dapat terjadi secara bilateral, regional, subregional atau antardaerah. Negara-negara berkembang berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sumber daya untuk memenuhi tujuan pembangunan mereka melalui upaya bersama. Perkembangan terkini dalam Kerjasama Selatan - Selatan telah mengambil bentuk peningkatan volume perdagangan Selatan-Selatan, arus Selatan - Selatan dari investasi asing langsung, gerakan ke arah integrasi regional, transfer teknologi, berbagi solusi dan ahli, dan bentuk lain dari pertukaran (United Nations Development Program, 2014)

Sebenarnya, isu mengenai komitmen bantuan negara maju terhadap negara berkembang telah tertuang dalam Deklarasi Paris tahun 2005. Deklarasi

Paris mengenai Efektivitas Dana Bantuan yang dikeluarkan pada Maret 2005 merupakan komitmen internasional yang disepakati lebih dari 100 menteri, kepala lembaga, dan pejabat-pejabat senior. Tujuannya, memadukan dan menyatukan pengelolaan dana bantuan untuk membantu negara-negara berkembang dalam menyusun dan menerapkan rencana pembangunan di negara mereka sendiri, berdasarkan prioritas nasional masing-masing, agar negara-negara tersebut bisa membuat strategi serta menerapkan sistem yang sesuai (Admin KeuLSM, 2005)

Pernyataan Helen Clark, selaku administrator *United Nations Development Program* (UNDP) ketika berlangsungnya Konferensi PBB mengenai Kerjasama Selatan-Selatan di Nairobi, Kenya, pada tanggal 1-3 Desember 2009 kembali mengemukakan topik Kerjasama Selatan-Selatan. Dalam konferensi ini, Helen Clark menyatakan bahwa Kerjasama Selatan-Selatan harus berlandaskan pada kemitraan yang sejajar dan solidaritas antar negara, sehingga akan mendorong peningkatan kerjasama (United Nations, 2009). Pasca Perang Dunia II, permasalahan mengenai kemiskinan dan pengangguran menjadi isu yang dirasa relevan, terutama mengingat banyaknya negara-negara yang baru merdeka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Oleh karena itu, Kerjasama Utara-Selatan kemudian digulirkan sebagai bentuk bantuan pembangunan dari negara-negara maju kepada negara berkembang. Selanjutnya, berbagai bentuk bantuan pembangunan juga diberikan di antara sesama negara Selatan (negara berkembang), yang kemudian saat ini dikenal dengan istilah Kerjasama Selatan-Selatan.

Konsep Kerjasama Selatan-Selatan tersebut pada perkembangannya diadopsi oleh PBB pada 1978 melalui *Buenos Aires Plan of Action* (BAPA) on *Technical Cooperation among Developing Countries*. *Buenos Aires Plan of Action* (BAPA) menjadi tonggak bagi Kerjasama Teknik antar Negara Berkembang (KTNB). KTNB pada dasarnya adalah kerjasama teknik Selatan-Selatan yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan percepatan pembangunan di negara-negara berkembang. Kerja sama teknik juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemitraan antar negara. (Kementerian Luar Negeri RI, 2009).

Pada dasarnya keterlibatan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan mempunyai legitimasi sejarah yang kuat. Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 1955 di Bandung dapat dikatakan sebagai cikal bakal dari lahirnya konsep Kerjasama Selatan-Selatan. Konferensi tersebut telah menyepakati perlunya kerjasama ekonomi dan budaya diantara negara-negara Asia-Afrika melalui penyediaan bantuan teknis, pertukaran para ahli untuk mendukung proyek-proyek pembangunan, dan pertukaran keahlian teknologi (*exchanging technological know-how*) dengan pendirian lembaga pelatihan dan penelitian regional.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi menegaskan, Indonesia merupakan salah satu pemain kunci dalam forum Kerjasama Selatan-Selatan. Pasalnya, reputasi Indonesia sebagai negara yang toleran membuat banyak negara menaruh kepercayaan. Apalagi, sudah banyak program bantuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sampai Maret 2015, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah melakukan 1.200 program dengan total 4.400 partisipan dari 99 negara (Jawapos, 2015:5).

Peran strategis Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan sebenarnya bisa terlihat dari peran aktifnya pada sejumlah forum, seperti misalkan *Bogota High Level Event on South-South Cooperation and Capacity Development* (Bogota HLE) pada bulan Maret 2010. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam *Task Team on South-South Cooperation* (TT-SSC) sebagai salah satu dari 15 anggota *Steering Committee*. Peran ini sedikit banyak telah menunjukkan upaya Indonesia untuk lebih meningkatkan Kerjasama Selatan-Selatan (Alisjahbana, 2010)

Tahap selanjutnya yang menunjukkan keaktifan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan adalah di tanda tangannya "*Jakarta Commitment*" pada bulan Januari 2009. Perjanjian ini di tanda tangani oleh pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan 22 negara dan 4 lembaga donor multilateral. Negara-negara dan lembaga donor multilateral tersebut adalah Australia, Jepang, Polandia, Belanda, *Asian Development Bank*, *World Bank*, Austria, Finlandia, Perancis, *Agence Francaise de Developpement*, Jerman, Italia, Swedia, *Canadian International Development Agency*, *Departement for International Development of the United Kingdom*, *Japan International Cooperation Agency*, *Korea International Cooperation Agency*, *New Zealand Agency for International*

Development, Norwegia, *United States Agency for International Development/Indonesia*, *Delegation of the European Commission*, *United Nations System in Indonesia*, *Islamic Development Bank*, Denmark, Republik Korea, dan Swiss. Kesepakatan bersama ini ditujukan untuk melaksanakan langkah-langkah baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bagi peningkatan efektivitas pinjaman ataupun hibah luar negeri dalam pembangunan. Selaras dengan Deklarasi Paris 2005 tentang efektivitas bantuan luar negeri, *Jakarta Commitment* bertujuan untuk memberikan kesamaan posisi suatu *partnership* yang lebih setara (Komitmen Jakarta, 2009).

Salah satu poin penting dalam *Jakarta Commitment: Aid for Development Effectiveness Indonesia's Road Map to 2014* adalah perbaikan mekanisme bantuan internasional dan penguatan Kerjasama Selatan-Selatan. Dalam komitmen ini, Pemerintah Indonesia dan *development partners* berkomitmen untuk memperkuat proses regional dan kelembagaan dalam memfasilitasi Kerjasama Selatan-Selatan.

Melihat perkembangan lebih jauh, selanjutnya pada tahun 2010 Kerjasama Selatan-Selatan telah dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dalam RPJMN 2010-2014 tersebut kemudian dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta berbagai keunggulan ekonomi dan politik internasional telah menjadi bagian penting dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Indonesia diharapkan untuk memainkan peran yang lebih penting dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Saat ini status Indonesia telah meningkat menjadi *middle income country*, dimana pendapatan per kapita penduduknya telah menembus level US\$ 2.000. Indonesia juga tidak hanya menjadi negara penerima bantuan, tapi kini terus mengembangkan posisi strategis sebagai mitra pembangunan negara-negara lain. Dengan berbagai kemajuan pembangunan yang dimilikinya, Indonesia diharapkan untuk membagi pengalamannya dengan negara-negara *low-income countries* (Bapenas, 2009)

I.2 Rumusan Masalah

Pemaparan latar belakang telah menggarisbawahi kaitan antara Indonesia dengan Kerjasama Selatan-Selatan. Setelah memahami latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian yaitu **mengapa Indonesia berperan aktif dalam Kerjasama Selatan-Selatan periode 2010-2014? Apakah kepentingan nasional yang ingin dicapai Indonesia melalui peran aktifnya dalam Kerjasama Selatan-Selatan periode 2010-2014?**

I.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pastilah memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Melalui penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

- a. Memahami apa itu Kerjasama Selatan-Selatan;
- b. Memahami kaitan Kerjasama Selatan-Selatan dengan Indonesia;
- c. Menganalisis kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia melalui peran aktifnya dalam Kerjasama Selatan-Selatan selama periode 2010-2014.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat praktis dan akademis, yaitu:

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hubungan internasional mengenai Kerjasama Selatan-Selatan dan kaitannya dengan kepentingan nasional Indonesia;
- b. Secara akademis, penelitian ini memberikan suatu informasi, data dalam jurusan Ilmu Hubungan Internasional untuk memperkaya wawasan mengenai analisis kepentingan nasional Indonesia melalui Peran Aktif dalam Kerjasama Selatan-Selatan periode (2010-2014) dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi mahasiswa hubungan internasional dalam melengkapi karya tulisnya.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan sebuah penelitian dibutuhkan sumber-sumber yang aktual yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah kerangka pemikiran salah satunya adalah penelitian terdahulu. Sub-bab ini menyajikan hasil-hasil penelitian tentang Indonesia dan Kerjasama Selatan-Selatan yang telah dilakukan terlebih dahulu, berkaitan dengan kajian mengenai Indonesia dan kaitannya dengan Kerjasama Selatan-Selatan.

a. Pengertian Kerjasama Selatan-Selatan

Kerjasama Selatan-Selatan adalah kerangka kerja yang luas untuk kolaborasi di antara negara-negara Selatan dalam domain politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan teknis. Melibatkan dua atau lebih negara-negara berkembang, hal itu dapat terjadi secara bilateral, regional, subregional atau antardaerah. Negara-negara berkembang berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sumber daya untuk memenuhi tujuan pembangunan mereka melalui upaya bersama. Perkembangan terkini dalam Kerjasama Selatan - Selatan telah mengambil bentuk peningkatan volume perdagangan Selatan-Selatan, arus Selatan - Selatan dari investasi asing langsung, gerakan ke arah integrasi regional, transfer teknologi, berbagi solusi dan ahli, dan bentuk lain dari pertukaran (United Nations Development Program, 2014).

Konsep Kerjasama Selatan-Selatan tersebut pada perkembangannya diadopsi oleh PBB pada 1978 melalui *Buenos Aires Plan of Action (BAPA) on Technical Cooperation among Developing Countries*. *Buenos Aires Plan of Action (BAPA)* menjadi tonggak bagi Kerjasama Teknik antar Negara Berkembang (KTNB). KTNB pada dasarnya adalah kerjasama teknik Selatan-Selatan yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan percepatan pembangunan di negara-negara berkembang. Kerja sama teknik juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemitraan antar negara (Kementerian Luar Negeri RI, 2009).

Pada dasarnya keterlibatan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan mempunyai legitimasi sejarah yang kuat. Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 1955 di Bandung dapat dikatakan sebagai cikal bakal dari lahirnya konsep

Kerjasama Selatan-Selatan. Konferensi tersebut telah menyepakati perlunya kerjasama ekonomi dan budaya diantara negara-negara Asia-Afrika melalui penyediaan bantuan teknis, pertukaran para ahli untuk mendukung proyek-proyek pembangunan, dan pertukaran keahlian teknologi (*exchanging technological know-how*) dengan pendirian lembaga pelatihan dan penelitian regional.

b. Posisi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan

Hal senada dituliskan oleh Esti Andayani (2009) dalam tulisannya yang berjudul: “Transformasi Kerjasama Teknik Indonesia: Dari Negara Penerima Menjadi Negara Pemberi Bantuan” yang dimuat dalam halaman 4-5 Tabloid Diplomasi nomor 22 yang diterbitkan pada 15 Agustus 2009 menyatakan bahwa pada awalnya, sekitar periode 1970-an, Indonesia banyak menerima bantuan teknik dari negara-negara maju. Hal ini merupakan hal yang wajar bagi negara yang masih muda usianya. Negara mana pun akan melakukan hal yang sama untuk menerima bantuan asing sebelum dapat memberikan bantuan kepada negara lain. Pemerintah Jepang, melalui JICA, telah banyak membantu Indonesia di dalam meningkatkan kapasitasnya di beberapa bidang seperti pertanian, peternakan, kesehatan, teknologi informasi, penyiaran (televisi), rehabilitasi vokasional bagi penyandang cacat dll. Beberapa pusat pelatihan telah didirikan di Indonesia atas bantuan pemerintah JICA.

Seiring dengan meningkatnya kapasitas Indonesia, baik kapasitas SDM maupun kapasitas kelembagaan, sejak tahun 1981 Indonesia bekerjasama dengan JICA mulai memberikan bantuan teknik dalam rangka program KTNB kepada negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, Pasifik, bahkan Amerika Latin, dalam bentuk pelatihan dan pengiriman tenaga ahli. Ribuan peserta telah berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti berbagai pelatihan. Berdirinya Direktorat Kerjasama Teknik pada tahun 2006 telah memberikan ruang yang lebih luas bagi Indonesia untuk memberikan bantuan teknik bagi negara-negara lain, melalui program pelatihan, pengiriman ahli, loka karya, pemagangan dan pemberian bantuan peralatan yang dibiayai oleh APBN. Berbagai pengalaman Indonesia telah dibagikan kepada negara-negara berkembang lain yang membutuhkan. Topik dan isu-isu baru yang menjadi perhatian dan kepentingan

negara-negara berkembang telah pula dituangkan menjadi topik pelatihan seperti perubahan iklim, energi terbarukan, *micro finance*, pemberdayaan perempuan serta demokrasi dan *good governance*. Dengan demikian sejak tahun 1980-an Indonesia tidak semata, namun telah juga menjadi pemberi, atau pada tingkatan tertentu telah menjadi donor atau *resource country*.

c. Manfaat Kerjasama Selatan-Selatan Bagi Indonesia

Dengan semakin meningkatnya peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan, maka kemudian muncul pembahasan mengenai manfaat apa yang dapat diperoleh Indonesia melalui kerangka Kerjasama Selatan-Selatan ini. Adirini Pujayanti (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “Kerjasama Selatan-Selatan dan Manfaatnya bagi Indonesia”, diterbitkan oleh Jurnal Politica volume 6 nomor 1 tahun 2015 menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri KSS merupakan terobosan penting bagi kepentingan nasional Indonesia yang harus terus dipertahankan dan diperkuat. Pemanfaatan KSS bagi kepentingan politik luar negeri Indonesia berhasil memperluas jaringan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Terkait dengan pencapaian sasaran tersebut, tantangan terbesar adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan potensi strategisnya secara maksimal dalam konstelasi politik regional dan global. Kebijakan luar negeri KSS akan tetap memainkan peran penting dalam menghadapi berbagai ancaman separatism, terutama guna mencegah adanya internasionalisasi isu-isu separatisme di dalam negeri serta mengupayakan dukungan internasional terhadap integritas wilayah Indonesia.

Akan tetapi jurnal ini berpendapat bahwa KSS di Indonesia selama ini belum berjalan optimal karena tersebar di berbagai kementerian dan seringkali tidak berkelanjutan. Maka menurut Adirini, demi efektifitas KSS perlu dibentuk satu lembaga otonom yang secara khusus menangani masalah ini sebagaimana yang ada di beberapa negara. Pengelolaan kebijakannya sepatutnya dilembagakan dan didukung oleh tim yang solid. Koordinasi di antara Kementerian/Lembaga dalam KSS sangatlah diperlukan untuk menetapkan program di masa datang dalam mengkombinasikan kapasitas kementerian-kementerian yang berbeda. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang kaitan dan peranan Indonesia dalam KSS, sedangkan

perbedaannya dengan penelitian penulis adalah jurnal ini focus pada manfaat KSS bagi Indonesia sedangkan penelitian penulis lebih difokuskan kepada analisis kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia melalui KSS.

Selanjutnya ada pula tulisan dari M. Dirhamsyah dan H. Syahputra (2008) dalam artikelnya yang berjudul: “Kerjasama Selatan-Selatan dan Cita-Cita Pengurangan Resiko Bencana” yang dimuat di website resmi Syiah Kuala University, mengatakan bahwa hubungan Indonesia dengan sesama negara berkembang telah berkembang bukan saja pada bidang ekonomi dan politik, tetapi juga telah mencakup bidang-bidang teknis dan fungsional. Indonesia berpartisipasi aktif dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction yang telah berlangsung sebanyak dua kali di Jenewa, Swiss, yaitu sesi pertama pada bulan Juni 2007, dan sesi kedua pada bulan Juni 2009. Forum yang diinisiasi oleh Kerjasama Selatan-Selatan ini merupakan wadah berbagi informasi dan bertukar pengalaman dalam pencegahan dan penanganan bencana alam. Pengalaman Indonesia dalam penanganan bencana tsunami dan gempa bumi yang terjadi secara beruntun merupakan modal yang dapat dibagikan kepada sesama negara berkembang dalam rangka mendukung peningkatan citra positif.

Afiliasi Indonesia melalui Kerja sama Selatan-Selatan untuk manajemen mitigasi bencana sebelumnya telah berlangsung melalui inisiatif Indonesia bersama-sama *Non Alignment Movement Center for South-South Technical Cooperation* (NAM CSSTC) yang didukung oleh UNESCAP dan Pemerintah Jerman untuk menggelar loka karya *Project on South-South Cooperation for Tsunami and other Disasters Risk Management*. Inisiatif ini didukung oleh 10 negara di Asia Pasifik, yaitu Bangladesh, China, Fiji, India, Indonesia, Iran, Maldives, Filipina, Srilanka dan Thailand. Pada akhir tahun 2008, lima negara yaitu Laos, Myanmar, PNG, Timor Leste dan Vietnam ikut bergabung. Indonesia menjadi sekretariat ad interim untuk kerjasama 15 negara tersebut. Berbagai kegiatan telah dilakukan, antara lain lokakarya keterkaitan antara adaptasi perubahan iklim dengan “*risk disaster reduction*” dan strategi untuk mendorong efektivitas kemitraan untuk mengembangkan *Regional South-South Cooperation Mechanism*. Untuk kegiatan tersebut, telah diidentifikasi sejumlah inisiatif dan area prioritas di bawah kerangka *Hyogo Framework of Action*. Pada inisiatif

tersebut, Indonesia menjadi *focal point* proyek *Human Resources Development*. Bekerja sama dengan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana Universitas Syah Kuala, Pemerintah Indonesia dan NAM CSSTC menjajaki kerja sama dengan *Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) South-South Cooperation Program World Bank*. Artikel ini juga menjelaskan bahwa Kerjasama Selatan-Selatan adalah suatu bentuk alternatif kerjasama pembangunan untuk konteks middle income country pada level yang lebih rendah seperti halnya kondisi Indonesia.

Kesimpulannya, melalui Kerjasama Selatan-Selatan dapat dilihat bahwa Indonesia berperan aktif dengan banyak terlibat dalam kerjasama diantara negara-negara berkembang tersebut di berbagai bidang. Walaupun masih kurangnya kekompakan kememntaian dalam mengelola kebijakan luar negeri Kerjasama Selatan-Selatan, namun kegiatan-kegiatan kerjasamanya terus berlangsung. Bila melihat kedalam politik dan ekonomi dalam negerinya Indonesia belum sestabil negara-negara maju, namun Indonesia mampu terus menjalankan berbagai kerjasama dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan. Maka dari itu penelitian ini dirasa perlu untuk mengetahui kepentingan nasional apakah yang sebenarnya hendak dicapai oleh Indonesia melalui Kerjasama Selatan-Selatan ini.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.

Menurut H. J. Morgenthau yang dipaparkan dalam buku R. Soeprapto, kepentingan nasional merupakan kewajiban yang dimiliki suatu negara bangsa dalam rangka berinteraksi dengan dunia internasional untuk menanggapi situasi dan berbagai tujuan nasional yang diinginkan oleh suatu negara bangsa. Morgenthau mengartikan kepentingan nasional sebagai konsep *power*. Konsep tersebut merupakan pertimbangan utama suatu negara yang memberikan bentuk kepada kepentingan nasional. Kepentingan nasional diakui sebagai konsep kunci politik luar negeri suatu negara mengenai kepentingan nasional. Dengan kata lain, kepentingan nasional suatu negara dapat dilihat melalui politik luar negerinya (Soeprapto, 1997:4-5).

Mengacu pada definisi tersebut, apabila dikaitkan dengan peran aktif Indonesia dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan pasti memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai di dalamnya. Dewi Fortuna Anwar dalam orasi ilmiahnya sebagai staff ahli peneliti LIPI memberi keterangan tentang kepentingan nasional secara kontradiktif, disatu sisi secara objektif bahwa kepentingan nasional bisa didefinisikan secara jelas dengan kriteria yang objektif dan cenderung konstan dari waktu ke waktu. Disisi lain kepentingan nasional bisa diartikan subjektif, artinya kepentingan nasional selalu berubahmengikuti preferensi subjektif para pembuat keputusan (Wuryandari, 2008:14)

Pencapaian kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis baik dalam tataran global maupun regional yang memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi proses pencapaian kepentingan tersebut. Dan dalam rangka menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah dengan cepatnya, semakin disadari perlunya untuk mengembangkan kelenturan dan keluwesan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri agar dapat memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang yang muncul dari perubahan lingkungan strategis secara optimal. Upaya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia di dunia Internasional dilaksanakan melalui diplomasi. Dengan total diplomasi Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Dari penjelasan diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa kepentingan nasional erat kaitannya dengan diplomasi dan kebijakan luar negeri.

I.6.2 Kerjasama Internasional

Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda, demikian pula dengan kemampuan dan juga potensi yang dimiliki tiap negara berbeda. Hal tersebut menyebabkan suatu negara kemudian membutuhkan kemampuan dari negara lain yang tidak dimiliki di negaranya. Keberadaan kerjasama internasional menjadi penting adanya karena manfaatnya dapat dimaksimalkan untuk menumbuhkan rasa persahabatan dan pengertian antar negara satu dan lainnya.

Menurut K. J. Holsti, kerjasama internasional dapat menimbulkan satu citra akan suatu organisasi internasional yang bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah biasa, atau ahli-ahli teknis dalam lapangan yang membantu pihak lain meningkatkan produktivitasnya. Kerjasama juga dapat terjadi dalam konteks yang berbeda, usaha-usaha kerjasama lain dijalankan dalam berbagai organisasi dan lembaga internasional. Perumusan kebijakan umum atau koordinasi kebijakan nasional yang terpisah dilakukan atas dasar multilateral, dan sering mencakup rencana dan usul-usul yang tidak dikonsepsikan oleh pemerintah nasional tetapi oleh pejabat sipil internasional. Jumlah lembaga multinasional yang dirancang untuk mengembangkan tujuan ekonomi, teknik, atau diplomatic-militer atau mengurus masalah bersama telah tumbuh pesat mulai dari tidak sampai sepuluh pada tahun 1870 menjadi lebih dari 270 pada tahun 1982. Walaupun banyak peraturan sangat lemah dan sering tidak efektif, pemerintah telah dipaksa menggunakan makin banyak waktu untuk merundingkannya guna mencegah situasi yang merupakan bencana besar yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi dan teknologi yang maju pesat. Dengan demikian, konferensi multilateral yang besar dan berlangsung lama menjadi forum yang semakin nyata untuk kerjasama internasional (Holsti, 1983:209). Sesuai dengan teori Holsti tersebut, Kerjasama Selatan-Selatan melibatkan dua atau lebih negara-negara berkembang, hal itu dapat terjadi secara bilateral, regional, subregional atau antardaerah.

I.6.3 Konsep Kerjasama Selatan-Selatan

Kerjasama Selatan-Selatan adalah proses historis dengan karakteristik unik, yang mencerminkan solidaritas, penyesuaian dengan konteks lokal dan kapasitas, dan mempromosikan kerjasama saling menguntungkan dan win-win outcomes dalam kemitraan horizontal.

Menurut *New International Economic Order* tahun 1974 memberikan definisi Kerjasama Selatan-Selatan sebagai: “Kemandirian kolektif dan kerja sama yang berkembang di antara negara-negara berkembang akan lebih memperkuat peran mereka dalam tata ekonomi internasional yang baru”. Kemudian, *Bogota Statement* tahun 2010 yang mengatakan: “Kerjasama Selatan-Selatan adalah ekspresi kolaborasi nasional dan kepentingan bersama antara negara-negara mitra di tingkat global, regional, dan negara. Kerjasama Selatan-Selatan adalah proses historis dengan karakteristik unik, yang mencerminkan solidaritas, penyesuaian dengan konteks lokal dan kapasitas, dan mempromosikan kerjasama saling menguntungkan dan *win-win outcomes* dalam kemitraan horizontal.

Kerjasama Selatan-Selatan bukanlah pengganti tetapi pelengkap kerjasama pembangunan Utara-Selatan, dengan aksi kerjasama triangular sebagai jembatan antara Kerjasama Selatan-Selatan dan Utara-Selatan. Kerjasama Selatan-Selatan berasal dari turunan proses dekolonisasi, tepat setelah PD II, dan merupakan bagian dari perjuangan untuk emansipasi ekonomi setelah pembebasan politik. Kerjasama Selatan-Selatan telah menjadi sarana untuk merestrukturisasi pola ekonomi kolonial, yang ditandai dengan dirampasnya fungsi koloni ‘sebagai pemasok komoditas primer dan pasar manufaktur yang saling melengkapi di antara mereka, dan hubungan vertikal yang mengisolasi hubungan geografis antara tetangga yang satu dengan yang lain. Karena itu tidak mengherankan jika manifestasi awal dari Kerjasama Selatan-Selatan muncul dalam bentuk asosiasi produsen komoditas dan kerjasama sub-regional. Pada tingkat global Kerjasama Selatan-Selatan ditandai dengan pembentukan Kelompok 77 pada tahun 1964. (Tabloid Diplomasi, 2012:9)

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa asumsi dasar sebagai berikut:

- a. Kerjasama Selatan-Selatan merupakan jalan bagi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional baik berupa kepentingan ekonomi, politik, maupun sosial budaya.
- b. Indonesia melalui Kerjasama Selatan-Selatan mencoba menunjukkan eksistensi diantara negara-negara berkembang.

I.9 Metode Penelitian

I.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif-anallitik. Di mana tujuannya adalah mengeksplorasi dan klarifikasi. Dimulai dengan menggambarkan, menjabarkan, dan menganalisis mengenai Kepentingan nasional Indonesia melalui peran aktif dalam Kerjasama Selatan-Selatan.

I.9.2 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang merupakan hasil-hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui

wawancara terhadap informan yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti penelusuran informasi dari beragam sumber baik berupa jurnal, buku, laporan tertulis, dokumen-dokumen, serta situs resmi internet yang terkait dengan Indonesia dan Kerjasama Selatan-Selatan.

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dengan praktisi yang terkait dengan permasalahan yang ditulis dan juga telaah pustaka (*library research*) sehubungan dengan permasalahan yang penulis bahas. Data ini dikumpulkan dari berbagai macam sumber dengan sumber utama yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, situs informasi resmi pemerintah, data yang tertulis di internet dan data-data lainnya yang berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia melalui peran aktifnya dalam Kerjasama Selatan-Selatan.

I.9.4 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yakni permasalahan di gambarkan berdasar fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Ada pun data berupa angka merupakan data penunjang dalam mengkaji fakta-fakta utama. Dengan menggunakan teknik ini, maka teknik analisa menggunakan pola deduktif yakni dari hal-hal yang sifatnya umum kemudian menariknya pada hal yang bersifat khusus.

I.10 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, terdapat sistematika penulisan terkait masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang runtut, tertata, dan beraturan. Untuk itu, dalam pembahasan penelitian ini, dibagi menjadi beberapa bagian untuk mempermudah pemahaman dan pengertian pembaca. Berikut adalah sistematika dari penelitian ini:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang mengenai sejarah Kerjasama Selatan-Selatan dan kaitannya dengan Indonesia secara umum. Selain itu, bab ini berisikan sub-bab lainnya seperti rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. DINAMIKA PELAKSANAAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah latarbelakang Kerjasama Selatan-Selatan di Indonesia selama periode-periode kepemimpinan Presiden terdahulu, bagaimana corak kebijakannya berubah di tiap-tiap pemerintahan, hingga dimasukkannya Kerjasama Selatan-Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014.

BAB III. KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA MELALUI PERAN AKTIF DALAM KERJASAMA SELATAN-SELATAN

Bab ini membahas kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan yang telah terlaksana selama periode 2010-2014, lembaga-lembaga pelaksana yang terkait, serta menjelaskan mengenai analisis kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia melalui peran aktif dalam Kerjasama Selatan-Selatan periode (2010-2014) yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan sosial-budaya.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia melalui peran aktif dalam Kerjasama Selatan-Selatan periode (2010-2014) yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian.